

# PENERAPAN KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DENGAN SISTEM ZONASI PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA BATAM

Melati Sinta Klaronika S<sup>1</sup>, Karol Teovani Lodan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam  
email: [pb191010005@upbatam.ac.id](mailto:pb191010005@upbatam.ac.id)

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the implementation of school zoning policies in high school PPDB (New Student Acceptance) in Batam city, evaluate their impact on equal distribution of access to education, and identify challenges faced in its implementation. The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The data used in this study were collected from interviews with related parties and collected data from various reliable sources. The results of the study show that the implementation of the PPDB zoning system in Batam City has had a positive impact in achieving equal access to education by prioritizing students from each school zone. However, this research also identified several challenges, such as adaptation to various local conditions and the importance of active community involvement in implementing this policy. This research contributes to understanding the implementation of the PPDB policy with the zoning system in Batam City and provides recommendations for policy improvement and further development in order to achieve equal and fair access to education for all students in Batam city.*

**Keywords:** School zoning policies, Fair access to education, education

## PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan yang perlu direncanakan dalam rangka meningkatkan kehidupan manusia, pengetahuan, dan pembangunan adalah Pendidikan (Nurjaningsih, 2019). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional dan dalam meningkatkan kecerdasan bangsa Indonesia. terhormat, sehat, berpendidikan, terampil, inventif, mandiri, dan berpartisipasi dalam demokrasi dan tanggung jawab sipil. Sebelumnya,

setiap sekolah akan menyelesaikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara manual (Launuha et al., 2021). Namun karena perkembangan TIK, PPDB kini telah diubah menjadi bentuk daring atau online (Ishak, 2020).

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan tahap krusial dalam sistem pendidikan yang berperan penting dalam memberikan kesempatan akses pendidikan kepada seluruh calon siswa (Haryanti et al., 2020; Kussetyaningsih, 2021). Di era persaingan global dan kemajuan teknologi informasi, penting bagi setiap daerah untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan PPDB yang tepat guna (Thoha & Ghazali, 2020). Kota Batam sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengatur

proses PPDB agar berjalan adil dan efektif dalam mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat (Chan et al., 2019; Setiawan & Usman, 2022). Salah satu kebijakan yang diterapkan untuk mencapai pemerataan akses pendidikan adalah sistem zonasi dalam PPDB (Satria, 2019). Sistem zonasi ini bertujuan untuk memastikan kesempatan setara bagi siswa dalam mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa terkendala jarak atau lokasi tempat tinggal (Dani Satria, 2019). Dengan membagi wilayah Kota Batam menjadi zona-zona tertentu, kebijakan zonasi sekolah diharapkan dapat meningkatkan distribusi siswa secara merata ke berbagai sekolah menengah atas di kota ini.

Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) digambarkan sebagai pemisahan wilayah menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018. Dengan diberlakukannya sistem zonasi, tujuan utama kebijakan ini adalah menghapuskan pengertian "sekolah favorit" (Adinda & Suyato, 2019), mewujudkan pemerataan akses pendidikan, menegakkan keadilan, dan mempercepat kemajuan kualitas siswa, tenaga penjualan, dan infrastruktur (Abu Bakar et al., 2020). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berupaya mewujudkan kesetaraan dalam pendidikan umum dan sekolah, serta kesetaraan dalam sarana dan prasarana, distribusi anggaran, keragaman tenaga pengajar, dan kesetaraan dalam inisiatif kebijakan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami penerapan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi di Kota Batam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan zonasi sekolah, mengevaluasi dampak

yang dihasilkan terhadap pemerataan akses pendidikan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui pemahaman lebih dalam tentang penerapan kebijakan zonasi PPDB di Kota Batam, diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan pendidikan di masa mendatang. Penelitian ini akan membahas secara komprehensif tentang penerapan kebijakan PPDB dengan sistem zonasi pada tingkat sekolah menengah atas di Kota Batam. Bagian selanjutnya akan menjelaskan tinjauan literatur terkait kebijakan zonasi sekolah dalam PPDB dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu prosedur dan skema yang digunakan dalam melakukan penelitian (Brandler & Roman, 2020). Penggunaan metode penelitian memungkinkan penelitian dilakukan secara terencana, ilmiah, netral, dan berorientasi pada nilai (Aspers & Corte, 2019). Metode penelitian berfungsi sebagai strategi untuk mengumpulkan data dan mencari solusi terhadap suatu masalah berdasarkan fakta. Dengan strategi deskriptif, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif (Nahid, 2003). Data primer dan data sekunder adalah dua jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti. Data primer adalah informasi yang telah dikumpulkan langsung dari sumber aslinya, seringkali dengan berbicara dengan informan itu sendiri. Istilah "data sekunder" menggambarkan informasi yang berasal dari buku, artikel, catatan, jurnal, dan penyelidikan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan zonasi, penerimaan siswa baru di SMA Kota Batam mengalami perubahan signifikan.

Proses penerimaan menjadi lebih terstruktur dan transparan dengan ketentuan bahwa setiap siswa hanya dapat mendaftar ke sekolah yang berada di zona tempat tinggal mereka. Data penerimaan peserta didik baru menunjukkan bahwa kebijakan zonasi telah berhasil meningkatkan keadilan akses pendidikan. Siswa-siswa dari latar belakang ekonomi lemah atau wilayah terpencil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bersekolah di sekolah-sekolah yang berkualitas.

Prinsip Penyelenggaraan non diskriminatif, yang berarti dalam penyelenggaraannya setiap warga negara berhak mendapat dan berpartisipasi dalam program Pendidikan tidak membedakan RAS, terkecuali sekolah khusus yang memang diperuntukkan pada suatu kelompok gender atau suatu kelompok agama tertentu. Objektif, yang berarti pelaksanaan yang berdasarkan pada aturan yang telah ditetapkan (M. Hanif Satria Budi, 2021). Transparan, yang berarti bersifat terbuka bagi semua warga negara, semua pihak dan termasuk masyarakat. Akuntabel, yang berarti dalam penyelenggaraan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Survei kepuasan masyarakat menunjukkan mayoritas warga Kota Batam mendukung kebijakan zonasi karena mengurangi kesenjangan antar sekolah dan meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, beberapa keluhan muncul terkait masalah transportasi dan jarak tempuh siswa ke sekolah. Kebijakan zonasi dinilai konsisten dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi. Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Kota Batam telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam distribusi peserta didik di berbagai sekolah menengah atas. Sebelumnya, terdapat kecenderungan peserta didik berkerumun di sekolah-sekolah tertentu yang memiliki reputasi baik atau terletak di pusat kota. Namun, setelah diterapkan sistem zonasi, distribusi peserta didik menjadi lebih merata di berbagai wilayah.

Kebijakan penerapan sistem zonasi di Kota Batam bertujuan untuk menciptakan

pemerataan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemerataan antara sekolah-sekolah di wilayah urban dan rural. Sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kota yang sebelumnya kurang diminati kini memiliki jumlah pendaftar yang lebih banyak, sementara sekolah-sekolah di pusat kota yang sebelumnya berada di bawah tekanan kapasitas sekarang memiliki beban yang lebih ringan. Penelitian ini juga mengukur tingkat kepuasan orang tua dan siswa terhadap penerapan sistem zonasi. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas orang tua merasa puas jika anak mereka diterima di sekolah yang berada di zona terdekat dengan tempat tinggal mereka. Namun, sebagian kecil orang tua merasa kecewa jika pilihan sekolah mereka terbatas akibat kebijakan zonasi (Anggraeni et al., 2022; Hendrawansyah & Zamroni, 2020). Meskipun demikian, tingkat kepuasan secara keseluruhan cenderung meningkat karena penerapan sistem zonasi berhasil mengurangi kesenjangan antara sekolah-sekolah yang menjadi favorit dan non-favorit.

Selama penerapan kebijakan zonasi, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak sekolah dan pemerintah (Basofi Sopiarno, 2015; Sopiarno, 2015). Beberapa tantangan tersebut meliputi kesulitan dalam menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat terkait proses pendaftaran dan zona-zona yang berlaku. Selain itu, ada juga beberapa kasus khusus yang membutuhkan pengecualian dari sistem zonasi, seperti siswa dengan kebutuhan khusus, yang memerlukan pendekatan khusus dalam penempatannya. Penerapan sistem zonasi di Kota Batam telah membawa manfaat dalam upaya pemerataan pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi, sekolah-sekolah di wilayah pinggiran kota mendapatkan kesempatan untuk menarik lebih banyak peserta didik, sehingga meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat di daerah tersebut.

Meskipun penerapan sistem zonasi berhasil dalam mencapai tujuan pemerataan, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa kebijakan ini

dapat berdampak pada mutu pendidikan. Sekolah-sekolah di zona yang kurang diminati mungkin menghadapi penurunan jumlah siswa dan keterbatasan sumber daya, seperti tenaga pengajar dan fasilitas (Ayunda, 2022; Chan et al., 2019). Sebaliknya, sekolah-sekolah di zona yang populer mungkin mengalami masalah kepadatan siswa dan kurangnya fasilitas yang memadai, yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran.

Penting untuk terus melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan sistem zonasi ini. Evaluasi ini perlu mencakup analisis dampak kebijakan terhadap pemerataan pendidikan, kepuasan orang tua dan siswa, serta mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Dengan demikian, perbaikan dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan agar sistem zonasi menjadi lebih efektif dan adil dalam mencapai tujuan penerimaan peserta didik baru. Penerapan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Partisipasi aktif dari semua pihak ini akan membantu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul selama proses implementasi dan meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), terdapat beberapa hambatan yang dihadapi di SMA Negeri di kota Batam:

Ada gangguan operasional atau masalah teknis dengan aplikasi online yang ditawarkan.

Ketersediaan jaringan di SMAN 14 Bandar Lampung tidak memadai, yang dapat menghambat proses pendaftaran siswa melalui sistem zonasi.

Adanya aturan kuota di luar zonasi, seperti jalur prestasi baik akademik maupun non-akademik, menyebabkan daya tampung di SMAN 14 Bandar Lampung tidak dapat terpenuhi.

Pola pikir masyarakat terhadap sekolah-sekolah unggulan masih belum berubah, yang dapat mempengaruhi minat pendaftaran siswa di SMAN 14 Bandar Lampung walaupun telah diterapkan sistem zonasi

Penerapan kebijakan zonasi telah terbukti efektif dalam meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi kemacetan pendaftaran siswa. Namun, ada potensi untuk meningkatkan efisiensi dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di setiap zona. Dampak positif kebijakan zonasi terlihat dari peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati. Namun, ada pula tantangan yang dihadapi, seperti transportasi dan penyesuaian bagi siswa yang berpindah sekolah.

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan zonasi meliputi resistensi dari pihak-pihak tertentu, pemilihan kriteria zonasi yang tepat, serta koordinasi yang efektif antara pemerintah daerah dan sekolah. Untuk meningkatkan penerapan kebijakan zonasi, alternatif solusi yang dapat diambil termasuk sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, evaluasi dan penyempurnaan kriteria zonasi, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di setiap zona.

## **SIMPULAN**

Penyebaran murid di berbagai sekolah di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh penggunaan sistem zonasi pada proses penerimaan siswa tingkat SMA. Di SMA di Kota Batam, sistem zonasi digunakan untuk menerima siswa baru dengan tujuan membina kesetaraan pendidikan. Karena zonasi, calon siswa lebih cenderung memilih sekolah di lingkungan tempat tinggal mereka. Hal ini mengurangi perbedaan prestasi antara sekolah perkotaan dan pedesaan serta kemungkinan konsentrasi siswa di sekolah tertentu.

Kebijakan penerapan sistem zonasi dapat berdampak pada seberapa puas orang tua dan anak terhadap sekolah. Jika anak mereka diterima di sekolah di zona yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka, orang tua seringkali lebih bahagia. Namun, jika peraturan zonasi membatasi pilihan mereka untuk sekolah, beberapa orang tua akan kecewa. Selama penerapan kebijakan zonasi, terdapat

tantangan yang harus dihadapi oleh pihak sekolah dan pemerintah, seperti memastikan informasi tentang proses pendaftaran dan zona-zona yang berlaku mudah diakses oleh masyarakat, serta menangani kasus-kasus khusus yang membutuhkan pengecualian dari sistem zonasi, seperti siswa yang memiliki kebutuhan khusus.

Penerapan sistem zonasi dapat berdampak pada mutu pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di zona yang kurang diminati cenderung menghadapi masalah penurunan jumlah siswa dan dapat mempengaruhi sumber daya sekolah, seperti tenaga pengajar dan fasilitas. Di sisi lain, sekolah-sekolah yang berada di zona populer dapat menghadapi masalah kepadatan siswa dan kurangnya fasilitas yang memadai.

Dalam jurnal ini, disarankan agar kebijakan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru secara berkala dievaluasi. Evaluasi ini harus mencakup analisis dampak kebijakan terhadap pemerataan pendidikan, kepuasan orang tua dan siswa, serta mutu pendidikan di masing-masing sekolah. Dengan demikian, perbaikan dan penyesuaian kebijakan dapat dilakukan agar sistem zonasi menjadi lebih efektif dan adil. Dalam rangka mengatasi beberapa tantangan dan dampak yang dihadapi dalam penerapan sistem zonasi, jurnal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan cara ini, penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi dapat berjalan lebih efektif, mendukung pemerataan pendidikan, dan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Batam.

#### DAFTAR PUSTAKA

Ishak, D. C. S. (2020). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2).

<https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7829>

- Abu Bakar, K. A., Supriyati, Y., & Hanafi, I. (2020). EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SISTEM ZONASI. *Akademika*, 9(02).
- Adinda, K., & Suyato. (2019). Dampak Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di SMAN 3 Yogyakarta Dan SMAN 7 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Kewaraganeeraan Dan Hukum*, 8(March).
- Anggraeni, A., Helpiastuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5).
- Aspers, P., & Corte, U. (2019). What is Qualitative in Qualitative Research. *Qualitative Sociology*, 42(2), 139–160. <https://doi.org/10.1007/s11133-019-9413-7>
- Ayunda, S. P. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) ZONASI DI SMA NEGERI 3 YOGYAKARTA. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 11 (4).
- Basofi Sopiatio. (2015). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. *Jom FISIP*, 2(1).
- Brandler, S., & Roman, C. P. (2020). Qualitative Research Methods. In *Handbook of Research Methods in Public Administration*. <https://doi.org/10.1201/9781420013276-17>
- Chan, F., Rimba, A., Setiawati, R., Nurlayly, C., & Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi, P. (2019). Dampak Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru. *Dikdas Matappa: Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar*, 2(2).

- Dani Satria. (2019). DAMPAK KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI DI SMA NEGERI 2 BANDAR LAMPUNG. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Haryanti, A., Robian, A., & Dindin. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020. *Prosiding Senantias*, 1(1).
- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN SISWA BARU SEKOLAH MENENGAH ATAS. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1). <https://doi.org/10.21831/jk.v4i1.27007>
- Kussetyaningsih, R. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI PADA JENJANG SMP NEGERI DI KOTA YOGYAKARTA. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 9(3). <https://doi.org/10.21831/sakp.v9i3.17204>
- Launuha, J., Armin Naway, F., & Suling, A. (2021). Implementasi Sistem Zonasi. *Student Journal of Educational Management*. <https://doi.org/10.37411/sjem.v1i2.945>
- M. Hanif Satria Budi. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) 2019/2020 DI KOTA YOGYAKARTA. *Paedagogia: Jurnal Pendidikan*, 10(1). <https://doi.org/10.24239/pgd.vol10.iss1.138>
- Nahid, G. (2003). Understanding reliability and validity in qualitative research. *The Qualitative Report*, 8(4), 597–607. <http://www.nova.edu/ssss/QR/QR8-4/golafshani.pdf>
- Nurjaningsih, S. (2019). MANAJEMEN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SISTEM ZONASI. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 1(2).
- Satria, D. (2019). Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Sistem Zonasi Di Sma Negeri 2 Bandar Lampung. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9).
- Setiawan, I. B., & Usman, H. (2022). Pola Implementasi Kebijakan Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru. *Mimbar Ilmu*, 27(2). <https://doi.org/10.23887/mi.v27i2.51604>
- Sopiatno, B. (2015). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru Tahun 2011-2013. *Jom FISIP*, 2(1).
- Thoha, M., & Ghazali, H. A. (2020). Dampak Penerapan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1). <https://doi.org/10.19105/tjpi.v15i1.3302>